

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia.
- Atin Pujiastuti, 2013, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Media, Jakarta.
- Charles E.M,Jr.,Taxation, Inggris.
- Eddy Hiariej, 2016, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Evi Hertanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frederick Knecht, 1986, Extrajurisdiction Money Laundering Offence, Standford.
- Hanafi Amrani, 2015, Hukum Pidana Pencuciaan Uang, UII Press, Yogyakarta.
- Harmadi, 2011, Kejahatan Pencucian Uang, Setara Press.
- Ivan Yustiavandana dkk, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang, Ghalia Indonesia, Bogor.
- James Fiesher, Philosophy Of Law.
- John Mill, 1993, Criminal Law.
- J. Donahue, 2006, Criminalization, John Hopkins University.
- J. Sethapi, 2003, Bisnis Uang Haram, KHN, Jakarta.
- Law Black Dictionary.
- Mahrus Ali, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.

- Moeljatno, 1995, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.
- Muhammad Saidi, 2011, Kejahatan Di Bidang Perpajakan, Rajawali Pers, Jakarta.
- N.H. Siahaan, 2000, Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan, Sinar Harapan, Jakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kompilasi UU tentang Ratifikasi Konvensi PBB dan Standar Internasional Anti Pencucian Uang, Direktorat Hukum dan Regulasi, Jakarta.
- Rachmat Soemitro, 1986, Pajak Penghasilan, Eresco, Bandung.
- Reda Manthovi, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, CV Malibu, Jakarta.
- Santoso Brotodiharjo, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco Bandung
- Sasangka, 2012, Bahasa Indonesia Dalam Peraturan Perundang Undangan, Gapura Bahasa Indonesia, Yogyakarta.
- Sudikno Metrokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soewarno, 2004, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko, 2007, Penegakan Dan Perlindungan Hukum Dibidang Pajak, Salemba Empat.
- Suhariyono, 2009, Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutan Remi, 2003, Pencucian Uang: Sejarah, Pengertian dan Dampaknya, Jurnal Hukum Bisnis.
- Sutan Sjahdeini, 2004, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang, Pustaka Utama, Jakarta.
- Urip Santoso, 2009, Tax Amnesty dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara.
- USU Law Journal, Vol. 4 No.1, Januari 2016.
- Wirawan, 2011, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.

Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Jakarta.

Yunus Husein, 2004, *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Jakarta, hlm.39.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI

Republik Indonesia. 1949. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1949 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. 1954. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1945 tentang Amnesti dan Abolisi. Lembaran Negara Tahun 1954. Nomor 146 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 730 Yang Dicitak Ulang. Kementrian Kehakiman. Jakarta.

Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP).

Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Tahun 2010. Nomor 122. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017. Lembaran Negara Tahun 2016. Nomor 240. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 131. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

The United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotics, Drugs And  
Psycotropic Substances

United Nation Convention Against Transnational Organised Crime

#### INTERNET

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Realisasi Penerimaan Negara  
Tahun 2015”, <http://kemenkeu.go.id/2016/realisasiapbn2015>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Realisasi Penerimaan Negara  
Tahun 2016”, <http://kemenkeu.go.id/2017/realisasiapbn2016>.

Wikipedia, Penghindaran Pajak, [http://wikipedia.org/wiki/Penghindaran\\_pajak](http://wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak).

Wikipedia, Pajak, <http://wikipedia.org/wiki/Pajak>.

[hukumonline.com, m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54809c011/hukuman-di-indonesia](http://hukumonline.com/klinik/detail/lt54809c011/hukuman-di-indonesia).

<http://materihukum.wordpress.com>alasan-penghapus-pidana>.

<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum>.

Kompensasi Kerugian, [www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show7id=60](http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show7id=60).

Fungsi Modal Dalam Memulai Usaha Maupun Mengembangkan Usaha,  
[www.transonl.blogspot.co.id/2013/11/fungsi-modal-dalam-memulai-usaha-maupun.html?m=1](http://www.transonl.blogspot.co.id/2013/11/fungsi-modal-dalam-memulai-usaha-maupun.html?m=1).

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/8/26/inkonsistensi-penegakan-hukum-uu-money-laundering-2010-kebijakan-legislatif-yang-berpotensi-melanggar-hak-azasi-manusia-ham/>.

[Catatanlengkapfatma.blogspot.co.id/2013/12/menejemen-resiko-bank-sebagai-bisnis.html?m=1](http://Catatanlengkapfatma.blogspot.co.id/2013/12/menejemen-resiko-bank-sebagai-bisnis.html?m=1), yang diakses pada 29 Agustus 2017 pada Pukul 06.49 WIB.

[Hukumonline.com/klinik/detail/lt48ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti](http://Hukumonline.com/klinik/detail/lt48ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti).